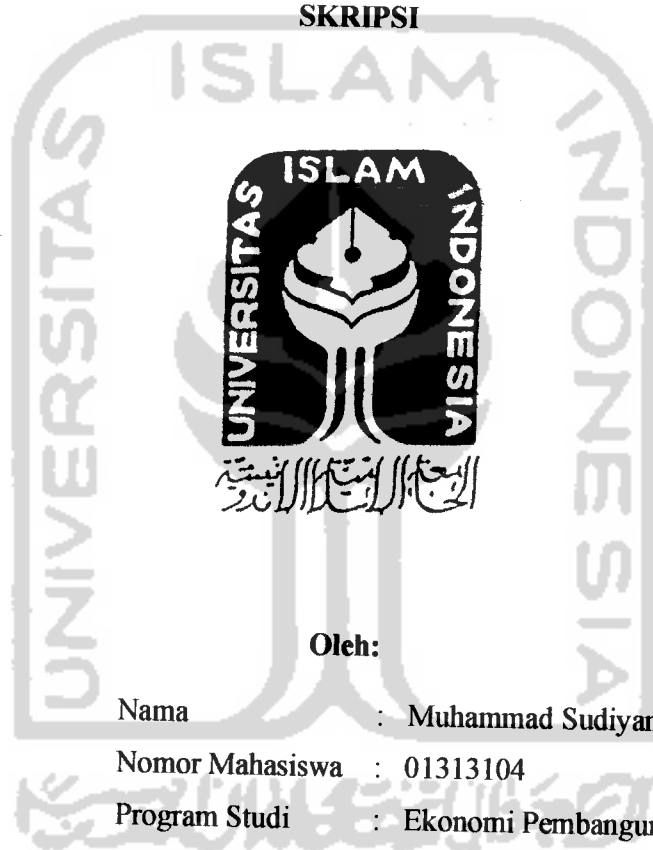


**Analisis Perbandingan Investasi dan Ekonomi Daerah Sebelum dan Sesudah
Pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1998 – 2003
(Melalui pendekatan Paired Sample T-Test)**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Muhammad Sudiyanto
Nomor Mahasiswa : 01313104
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

**Analisis Perbandingan Investasi dan Ekonomi Daerah Sebelum dan Sesudah
Pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1998 – 2003
(Melalui pendekatan Paired Sample T-Test)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

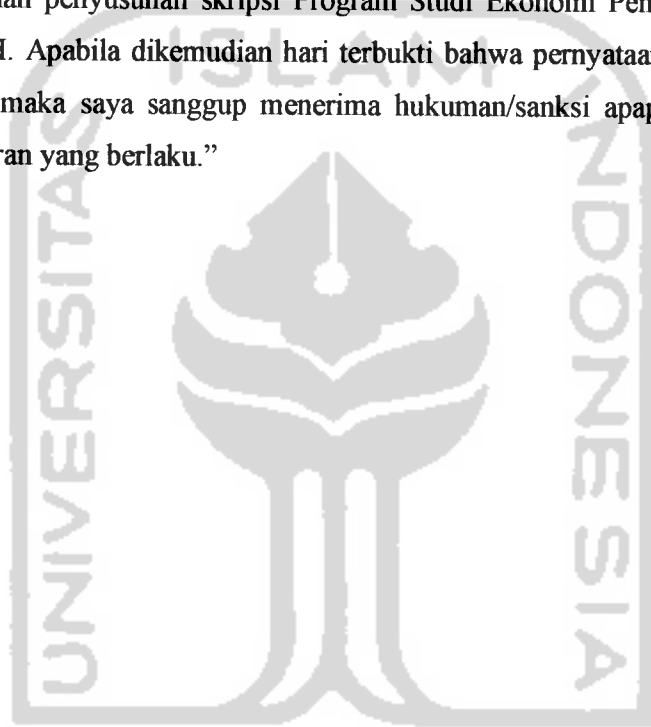
Oleh:

Nama : Muhammad Sudiyanto
Nomor Mahasiswa : 01313104
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



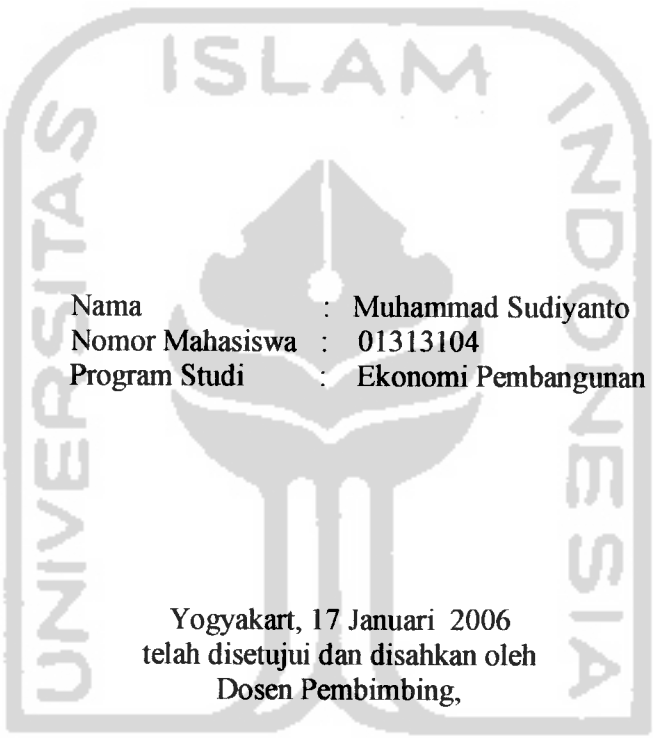
Yogyakarta, 10 Januari 2006

Penulis

Muhammad Sudiyanto

PENGESAHAN

**Analisis Perbandingan Investasi dan Ekonomi Daerah Sebelum dan Sesudah
Pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1998 – 2003**



Nama : Muhammad Sudiyanto
Nomor Mahasiswa : 01313104
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 17 Januari 2006
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Drs. Sahabudin Sidiq, MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PERBANDINGAN INVESTASI DAN EKONOMI DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 1998-2003**

Disusun Oleh: MUHAMMAD SUDIYANTO
Nomor Mahasiswa: 01313104

Telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal: 18 Maret 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Sahabudin Sidiq, MA

Penguji I : Dra. Indah Susantun, M.Si

Penguji II : Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT atas karunia, rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian sampai penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rosullah Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Islam yang telah mengubah jalan hidup manusia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang.

Sebagai suatu sunatullah bahwa kehidupan manusia dari waktu ke waktu berjalan dinamis, selalu ada perubahan dan pembaharuan. Manusia selalu mengharapkan suatu bentuk kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya karena manusia tidak bisa lepas dari salah dan lupa.

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini terdapat pemikiran yang banyak digunakan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi kita semua. Skripsi ini juga merupakan syarat akademik untuk meraih gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini berjudul "Analisis Perbandingan Investasi dan Ekonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Otonomi Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1998-2003. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
3. Bapak Rokhedi, SE selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Sahabudin Sidiq, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Nur Ferianto, Bapak Suharto, Bapak Munrokhim, Ibu Sarastri Mumpuni, Ibu Indah Susantun, Ibu Diana dan Dosen-dosen lainnya yang telah banyak mengajarkan Ilmu Ekonominya.
6. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan Doa-Doa, Harapan, Kasih Sayang, Semangat materiel maupun spiritual.
7. Sri Nuryanti Istriku Tercinta yang telah sabar menanti penulis menyelesaikan studiy di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Eka Wafa Nadhia Tercinta jadilah anak yang sholehah bisa berguna bagi agama, Nusa dan Bangsa.
9. Adik-adikku tercinta Muhaimin, Ahmad Sukrin Kartolo, Ridho Khasanah, Yayan Ali Sumarwan dan M Ravi Dwi Darmaji yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
10. Spesial friend Ahmad Rahmadi, Rizal Sujarwan, Hadi, Setyo Winarso, Heru PriyoDigdo, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan suportnya.
11. Bapak dan Ibu Kos yang memberikan perlindungan berteduh kepada penulis dan makananya tentunya.
12. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan studiy.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang proses pertumbuhan ekonomi regional yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Yogyakarta 18 Maret 2006

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	v
Halaman Daftar Isi.....	viii
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiv
Halaman Abstrak.....	xv
Halaman Moto.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan penelitian.....	7
1.4. Manfaat penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....	10
2.1. Keadaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	10
2.1.1 Situasi Wilayah dan Keadaan penduduk.....	10

2.1.2	Letak Geografis.....	12
2.1.3	Topografi.....	13
2.1.4	Jumlah Tenaga Kerja.....	13
2.2.	Tinjauan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	14
2.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta.....	14
2.2.2	Keuangan Daerah.....	20
2.2.3	Penanaman Modal Dalam Negeri.....	22
2.2.4	Penanaman Modal Asing.....	25
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....		28
BAB IV LANDASAN TEORI.....		36
4.1	Otonomi Daerah.....	36
4.2	Pendapatan Asli Daerah.....	39
4.3	Produk Domestik Regional Bruto.....	40
4.4	Investasi.....	42
4.4.1	Pengertian Investasi.....	42
4.4.2	Fungsi Investasi.....	42
4.4.3	Faktor-Faktor Yang Menentukan Investasi.....	42
4.5	Pembangunan Ekonomi Daerah.....	44
4.6	Pengertian Pembangunan.....	46
4.7	Indikator Pembangunan.....	49
4.8	Dualisme Regional Dalam Pembangunan.....	50

4.9 Pembangunan, Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan.....	53
4.10 Hipotesis.....	55
BAB V METODE PENELITIAN.....	57
5.1 Metode Penelitian.....	57
5.1.1 Daerah Penelitian.....	57
5.1.2 Jenis dan Sumber Data.....	57
5.2 Definisi Operasional.....	57
5.3 Metode Analisis Data.....	60
5.3.1 Analisis Deskriptif.....	60
5.3.2 Analisis Kuantitatif.....	60
5.3.2.1 Uji T Untuk Dua Sample Yang Berpasangan (Paired).....	60
5.3.2.1.1 Output Bagian Pertama (Group statistics).....	61
5.3.2.1.2 Otput Bagian Kedua atau Tabel Paired Samples Correlation.....	61
5.3.2.1.3 Output Bagian ketiga atau Tabel Paired Samples Test.....	61
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	63
6.1 Output Bagian Pertama (Group Statistics).....	63
6.2 Output Bagian Kedua (Paired Samples Correlations).....	65
6.3 Output Bagian Ketiga (Paired Samples Test).....	67
BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	70
7.1 Simpulan.....	70
7.2 Implikasi.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 PMA, PMDN, PDRB, PAD Sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daeah.....	5
2.1 Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Propinsi D.I.Yogyakarta.....	11
2.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun Dasar 1993, Di Prop D.I.Y	19
2.3 Pendapatan Asli Daerah Otonom Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 1998 sampai 2003.....	21
2.4 Kumulatif Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut sektor Di Propinsi D.I. Yogyakarta	24
2.5 Kumulatif Penanaman Modal Asing menurut Sektor Di Propinsi D.I.Yogyakarta.....	26
5.1 Penanaman Modal Asing Di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 1998 sampai 2003	58
5.2 Penanaman Modal Dalam Negeri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1998 sampai 2003	58
5.3 Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998 sampai 2003.....	59
5.4 Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998 sampai 2003.....	59

6.1	Paired sample Statistik.....	63
6.2	Paerid Sample correlation.....	65
6.3	Paerid Sample Test.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Data Asli sebelum di analisis Paired Sample T-Test yaitu PMA, PMDN, PDRB, PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah di Propinsi D.I Yogyakarta.....	76



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Perbandingan Investasi dan Ekonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Otonomi Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1998-2003. Data yang digunakan adalah data Sekunder yaitu data yang dibuat oleh BPS D.I.Yogyakarta, yang menjadi bentuk buku berjudul D.I.Yogyakarta Dalam Angka 1998 sampai 2003.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan PMA, PMDN, PDRB, PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1998 sampai 2003. Data tersebut diolah dengan menggunakan alat analisis Paired Sample T-Test.

Kesimpulan yang diperoleh adalah PMA tidak ada pengaruhnya sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah di Propinsi D.I.Yogyakarta. Sedangkan PMDN, PDRB, PAD ada pengaruhnya sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MOTO

Janganlah kamu mencoba menghindari masalah
Jangan pula kamu mencoba mencari cari masalah
Andai kamu ketemu masalah
hadapilah masalah dengan kesabaran dan senyuman

Hidup didunia hanyalah sementara maka jangan pernah kau sia siakan
Maka hiduplah dengan bahagia penuh kemuliaan
atau mati dengan syahid

Kebahagiaan pastilah impian semua orang
Hati yang bahagia cermin jiwa yang sehat
Jiwa unsur dari raga

Manusia mulia adalah
Manusia yang senantiasa menghargai sesama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub pemerintahan negara di maksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan. Partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana sekitar dua pertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai dari bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat (Shah dkk. 1997). Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan juga disebabkan oleh batasan hukum. Kondisi semacam ini, jelas tidak akan mampu mendukung

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana yang diharapkan. Penyelenggaraan otonomi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menggali dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. (Abdul Halim 2004:33).

Menyadari akan hal ini dalam upaya mengakomodir berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah selama ini pemerintah telah mensahkan undang-undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pemberlakuan kedua undang-undang ini akan membawa banyak perubahan dalam tata pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi daerah pemberlakuan kedua undang-undang ini khususnya undang-undang nomor 33 tahun 2004 semakin banyak membuka peluang dan harapan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan proporsional. Dampak pengimplementasian undang-undang ini terhadap satu daerah dengan daerah lainya akan berbeda-beda, tergantung pada sumber-sumber penerimaan (khususnya dari sumber bagi hasil) yang dimiliki masing-masing daerah. Dengan demikian pengimplementasian undang-undang ini disamping akan memacu pembangunan di daerah, juga mempunyai potensi untuk mendorong munculnya disparitas. Namun demikian keberadaanya dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik khususnya pada sektor penerimaan keuangan daerah.

Permasalahan krusial yang hingga kini belum bisa dituntaskan salah satunya adalah masalah pendistribusian hasil-hasil pembangunan atau dengan kata lain masalah keadilan dalam merasakan hasil dari pembangunan tersebut.

Pembangunan yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung tidak proporsional sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh sebagian penduduk Indonesia dan pada akhirnya memunculkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian penduduk lainnya.

Munculnya masalah keadilan dan pemerataan ini tentulah bukan merupakan hal yang dicari-cari karena sebenarnya masalah ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu Belanda memfokuskan pembangunan fasilitas-fasilitas sosial seperti; jalan, Rumah Sakit, sekolah, dan lain sebagainya hanya di pulau Jawa saja, yang pada saat itu digunakan untuk kepentingan penjajah Belanda.

Permasalahan ketimpangan ini terus berlanjut dari mulai pemerintahan Orde Baru hingga sekarang di era Reformasi. Walaupun pada dasarnya salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah adanya perbedaan potensi dan karakteristik wilayah serta sumber daya, akan tetapi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan mendistribusikan hasil-hasilnya memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam masalah ketimpangan tersebut.

Unsur perubahan adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota. Tuntutan itu wajar, paling tidak ada dua alasan diantaranya adalah. Pertama, (Mardiasmo, 2002:3): intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu yang telah menimbulkan masalah rendahnya kredibilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Kedua, dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang

muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Arahan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan utama, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional, dan kondisi sumber daya daerah yang dirasa masih relatif lemah. Karena dua alasan tersebut sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harapan masyarakat tentang Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan pembangunan daerah. Bertitik dengan nuansa desentralisasi, maka daerah diberi peluang untuk membangun sendiri daerahnya dengan bingkai acuan dari pusat.

Untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan

penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada dan memperhatikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), serta kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Data 6 tahun terakhir menunjukkan PMA, PDRB, PMDN, PAD Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

TABEL 1.1

PMA, PMDN, PDRB, PAD. SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANYA OTONOMI DAERAH DI PROP. D.I. YOGYAKARTA

KET.	THN	PMA US \$	PMDN RUPIAH	PDRB RUPIAH	PAD RUPIAH
Sebelum Otonomi Daerah	1998	140.065.688	Rp 1.299.965.604.260	Rp 4.685.777.000.000	Rp 40.594.308.000
	1999	129.141.658	Rp 1.322.585.842.887	Rp 4.824.445.000.000	Rp 57.877.500.000
	2000	101.061.428	Rp 1.815.182.865.869	Rp 5.017.709.000.000	Rp 84.225.979.000
Sesudah Otonomi Daerah	2001	125.804.700	Rp 1.941.346.291.893	Rp 5.182.544.000.000	Rp 142.284.892.000
	2002	106.478.568	Rp 1.961.732.260.090	Rp 5.395.054.000.000	Rp 169.489.772.000
	2003	140.035.056	Rp 2.405.274.896.484	Rp 5.615.557.000.000	Rp 208.475.720.000

Sumber data: D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998-2003

Otonomi Daerah yang berlaku sejak 1 januari 2001 Di Propinsi D.I. Yogyakarta yang sudah berlaku selama 5 tahun terakhir ini, memang tidak bisa disangsikan banyak membawa perubahan bagi daerah ini. Ini terbukti dengan banyaknya didirikan pusat perbelanjaan (Mall, Supermarket, Swalayan), Real estate, perguruan tinggi, industri yang mana ini merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang ditanamkan oleh investor dari dalam dan luar negeri. Hal ini menyumbang bagi pendapatan asli

daerah (PAD) dan juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks sumber daya manusia di DIY, dari sisi kualitas dan kuantitasnya, agaknya tidak terlalu menghawatirkan dalam menghadapi Otonomi Daerah. Sesuai dengan salah satu "*trade mark*" kota ini sebagai kota pendidikan, maka sangat banyak manusia-manusia berkualitas, terdidik dan terampil, untuk memberikan pemikiran dalam birokrasi tampaknya memang perlu ada orientasi baru agar jajaran yang berada dalam birokrasi tersebut betul-betul profesional, inovatif, aspiratif, dan memahami serta berorientasi pada kepentingan publik (Edy Suandi Hamid. 2001 :117).

Atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS PERBANDINGAN INVESTASI DAN EKONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**. Sebagai variabel pembanding penulis menggunakan data Penerimaan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan PDRB, dari tahun 1998 sampai tahun 2003.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan rata-rata PMA sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Y
2. Apakah ada perbedaan rata-rata PMDN sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Y
3. Apakah ada perbedaan rata-rata PDRB sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Y
4. Apakah ada perbedaan rata-rata PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Y

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis PMA sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Prop. D.I.Y
2. Untuk menganalisis PMDN sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Prop. D.I.Y
3. Untuk menganalisis PDRB sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Prop. D.I.Y
4. Untuk menganalisis PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Prop. D.I.Y

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk Pemda D.I.Yogyakarta sebagai masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pembangun daerah. khususnya dalam melaksanakan otonomi Daerah.
2. Untuk para pembaca diharapkan bisa mengetahui dan mendapat informasi tentang pembangunan daerah Di Prop. D.I.Yogyakarta sebelum dan sesudah adanya Otonomi Daerah.
3. Untuk peneliti bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti pembangunan daerah Di Prop.D.I.Yogyakarta

1.5. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan yang memuat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan manfaat, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Umum Subyek Penelitian, memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi daerah atau wilayah DIY.
- Bab III : Kajian Pustaka, memuat tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan.
- Bab IV : Landasan Teori, berisi deskripsi secara teoritis tentang variabel-variabel ekonomi yang diambil dari literatur-literatur yang relevan.
- Bab V : Metode Penelitian, mengandung uraian tentang bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variable dan data yang akan dikumpulkan dan analisis hasil.

Bab VI : Analisis dan Pembahasan, berisi tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik.

Bab VII : Simpulan dan Implikasi, simpulan berisi tentang simpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Sedangkan implikasi merupakan hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2.1.1. Situasi Wilayah Dan Keadaan Penduduk

Propinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk tercatat terakhir pada tahun 2003 sebanyak 3.207.385 jiwa memiliki luas wilayah 3.185,80 km², yang berarti berkepadatan 1.025 jiwa per km². Dan bila dilihat menurut daerah tempat tinggal penduduk yang tinggal diperkotaan lebih banyak dibanding yang tinggal dipedesaan.

Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan tercatat sebesar kurang lebih 1.865.169 jiwa atau 55,51 % dan sisanya sejumlah kurang lebih 1.495.179 jiwa atau 44,49 % bertempat tinggal di daerah pedesaan.

Penyebaran penduduk per daerah kabupaten atau kota masih menunjukkan pola yang tidak begitu banyak berubah dari tahun ketahun yaitu jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebesar 29,25 % diikuti berturut-turut Kabupaten Bantul 25,21 %, Kabupaten Gunungkidul 21,33 %, Kota Yogyakarta 12,47 % dan Kabupaten Kulonprogo 11,73 % dari total jumlah penduduk propinsi DIY.

Secara administrative wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi empat kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Sleman dan satu kota yaitu kota Yogyakarta, dan secara keseluruhan

terbagi atas 78 kecamatan, 169 kelurahan dan 269 desa. Berikut adalah rincian lengkap pembagian wilayah administrative tersebut:

TABEL 2.1

**KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003**

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Gunungkidul	18	5	139
2.	Bantul	17	47	28
3.	Sleman	17	59	27
4.	Kulonprogo	12	13	75
5.	Kota Yogyakarta	14	45	-
	DIY	78	169	269

Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2003

Kabupaten Gunung kidul memiliki 18 kecamatan dan 144 desa, Bantul memiliki 17 kecamatan dan 75 desa, Sleman memiliki 17 kecamatan dan 86 desa, Kulonprogo memiliki 12 kecamatan dan 88 desa sedangkan untuk Kota Yogyakarta memiliki 14 kecamatan dan 45 kelurahan.

Penyebaran dan kepadatan penduduk yang tersebar diseluruh kabupaten atau kota yang ada di Propinsi DIY menurut kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

Kabupaten Kulonprogo, dengan luas wilayah 586,27 Km², dan dengan jumlah penduduk 443.225 jiwa, artinya setiap 1 Km² terdapat 632 jiwa. Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 50.685 Km², dan dengan jumlah penduduk 780.177 jiwa, artinya setiap 1 Km² terdapat 1.570 jiwa. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas wilayah 1.486,36 Km², dan dengan jumlah penduduk

746.451 jiwa, artinya setiap 1 Km² terdapat 453 jiwa. Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 574,82 Km² dan dengan jumlah penduduk 856.558 jiwa, artinya setiap 1 Km² terdapat 1.606 jiwa. Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah 32,50 Km² dan dengan jumlah penduduk 500.949 jiwa, artinya setiap 1 Km² terdapat 12.114 jiwa.

Dari data diatas tampak bahwa Kota Yogyakarta menduduki urutan pertama dalam kepadatan penduduk dan diikuti selanjutnya oleh Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Distribusi penduduk dikabupaten atau kota dewasa ini masih menunjukkan adanya ketimpangan, kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah DIY berpenduduk 500.949 jiwa atau 12,47 % dari total penduduk DIY. Sedangkan kabupaten Gunungkidul yang luas wilayahnya 1485,36 Km² atau hampir separuh wilayah DIY berpenduduk 746.451 jiwa atau 21,33 % penduduk DIY.

2.1.2. Letak Geografis

Secara geografis, Propinsi DIY terletak diantara :

7° 30' sampai dengan 8° 15' lintang selatan

110° sampai dengan 110° 52' bujur timur

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Magelang.

Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten klaten dan wonogiri.

Sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.

Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Purworejo.

2.1.3. Topografi

Propinsi DIY mempunyai topografi yang bervariasi dari dataran rendah, perbukitan atau pegunungan sampai dataran tinggi. Berdasarkan klasifikasi tingkat kemiringan tanah di propinsi DIY dibagi menjadi 4 tingkat yaitu :

0° sampai 2° meliputi 38,42 % (122.396 ha)

2° sampai 15° meliputi 24,09 % (76.746 ha)

15° sampai 40° meliputi 25,31 % (80.617 ha)

40° ke atas meliputi 12,18 % (38.821 ha)

2.1.4. Jumlah Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan pemerintah di Propinsi DIY pada tahun 2003 didukung oleh 90.441 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahan tersebar pada 5 kabupaten/kota di DIY. Menurut golongan dari total PNS di DIY, 1,91 % menduduki golongan I, golongan II sebesar 23,69 %, 54,71 % menduduki golongan III, dan selebihnya golongan IV sebesar 19,69 %.

Gambaran tenaga kerja disektor swasta berdasarkan data Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2003 sebanyak 94.881 orang, menurun sekitar 11,26 % dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 106.923 orang. Mereka terdiri dari 52,17 % laki-laki dan 47,83 % perempuan. Dari jumlah tersebut 58,42 % berpendidikan SLTA, 34,95 % Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana, serta 5,46 % adalah SLTP dan sisanya 1,17% berpendidikan SD. Persentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan

penempatan masing-masing adalah 14,01 % dan 12,37% dari total pendaftar/pencari kerja.

Berdasarkan hasil Susenas 2003, persentase penduduk DIY umur 10 tahun keatas menurut kegiatan adalah 63,84 % merupakan angkatan kerja (58,63 % bekerja dan 5,21% mencari kerja), sedangkan sisanya sebesar 36,16 % merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 20,20%, 11,27 %, dan 4,69%). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 37,44%, perdagangan 19,75%, jasa 17,15% industri 12,18% dan sisanya 13,48 % di sektor-sektor lainnya.

2.2. Tinjauan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta

Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut. Hal ini misalnya terjadi pergeseran fungsi lahan pertanian yang diakibatkan semakin meluasnya perkembangan sektor industri yaitu pola perubahan masyarakat dari sektor pertanian menjadi sektor industri.

Kondisi perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1997 diwarnai dengan kegelapan. Keadaan ini secara menyeluruh dialami pula oleh propinsi-propinsi lain di Indonesia. Berawal dari depresiasi nilai Rupiah

terhadap US Dollar pada pertengahan tahun, terjadilah krisis ekonomi yang berkepanjangan, bahkan belum selesai hingga akhir tahun.

Walaupun pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 1997 tidak menunjukkan angka negatif tetapi tetap jauh dari target pertumbuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah yaitu 7,1% pertahun untuk pelita VI, pada tahun ini ekonomi DIY hanya mampu tumbuh 3,52% jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 7,8 % , penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ini disebabkan oleh terpuruknya sektor-sektor ekonomi karena krisis, utang luar negeri yang tidak terbayar pada waktunya, bahan baku impor yang tidak terbeli dan lesunya pasar karena nilai kurs Dollar yang terlalu tinggi.

Pada tahun 1998 kondisi perekonomian DIY ternyata lebih buruk dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997. dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian DIY ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan angka negatif pada tahun 1998, yaitu sebesar -11,28 %. Sementara pada tahun 1997 laju pertumbuhan ekonomi DIY masih menunjukkan angka positif, yaitu 3,53 %. Jadi boleh dikatakan pada tahun 1998 perekonomian DIY benar-benar terpuruk.

Pada tahun 1999 perkembangan ekonomi DIY nampaknya sudah mulai menunjukkan gejala kearah pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi DIY yang menunjukkan angka positif. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi DIY berhasil mencapai angka 1,01 %. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 1993-1997, angka pertumbuhan

ekonomi DIY tahun 1999 ini memang mengalami penurunan. Pada tahun 1993-1996 sebelum terjadi krisis ekonomi DIY boleh dikatakan relatif cukup tinggi. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi DIY secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian yang mengalami pelambatan, yaitu dengan laju pertumbuhan -5,75 % dan sektor pertambangan dan sektor penggalian yang berkembangnya statis dengan laju pertumbuhan 0,00 %. Sementara pada tahun 1998 hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih yang masih mampu tumbuh 0,18%. Pada tahun 1999 sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB DIY mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 1999 pertumbuhan sektor pertanian memperlihatkan angka -5,75 %, sedangkan pada tahun 1998 walaupun pertumbuhannya negatif, yaitu -5,39 % namun masih lebih baik dibandingkan keadaan tahun 1999. merosotnya pertumbuhan sektor pertanian ini disebabkan subsektor tanaman bahan makanan mengalami pertumbuhan negatif, yaitu -6,2 %, padahal subsektor inilah sebagai penyumbang terbesar terhadap sektor pertanian. Disamping itu, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya sebagai penyumbang terbesar kedua (setelah subsektor tanaman bahan makanan) terhadap sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu -6,11%. Pada tahun 1999 sektor ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan 3,43 %. Padahal tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif, yaitu -6,01%. Hal ini karena tetap bertahanya industri kecil dan kerajinan rumah tangga

yang jumlahnya cukup banyak di DIY. Timbulnya ide-ide (kreasi) baru dalam membuat suatu barang kerajinan dengan bahan baku yang mudah diperoleh di daerah sekitar atau dengan memanfaatkan limbah dan barang yang terbuang dari industri lain, menyebabkan usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga di DIY makin berkembang. Apalagi konsumennya tidak terbatas di wilayah DIY saja, bahkan beberapa barang kerajinan produksi Yogyakarta diekspor keluar negeri. Sektor ekonomi yang laju pertumbuhannya menempati peringkat kedua tertinggi sesudah industri pengolahan adalah sektor bangunan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,21 % pada tahun 1999. Sedangkan tahun sebelumnya sektor bangunanlah yang paling terpuruk dibandingkan sektor-sektor lainnya dengan pertumbuhan -32,83%.

Pada tahun 2000 perkembangan ekonomi semakin menunjukkan gejala ke arah pemulihan ekonomi. Dilihat dari pendapatan perkapita mengalami kenaikan 3,28 %. Kenaikan diatas 10% terjadi di sektor transportasi dan komunikasi dan sektor pertanian. Sedangkan kontribusi tinggi diberikan oleh sektor jasa, sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri masing-masing sebesar 20,47%, 17,96%, 15,78%, dan 13,24%.

Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian dengan laju pertumbuhan -1,60 %. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan laju pertumbuhan mencapai 10,39 %. Tingginya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh meningkatnya subsektor pengangkutan yang mencapai 10,78 %.

Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian dengan laju pertumbuhan -5,75 %. Pada tahun 2002 sektor ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan mencapai 11,03 %. Tingginya pertumbuhan sektor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya sub sektor bank yang mencapai 19,99 % dan subsektor sewa bangunan sebesar 10,85 %. Sektor ekonomi lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor bangunan dengan pertumbuhan 10,35 %, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai pertumbuhan dicapai 5 % walaupun tidak setinggi kedua sektor di atas.

Pada tahun 2003 perekonomian Propinsi D.I.Y mengalami pertumbuhan sekitar 4,09%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,02%. Hal yang paling menggembirakan dari gambaran ekonomi D.I.Y tahun 2003 adalah pertumbuhan positif dari seluruh sektor. Sektor bangunan tetap mengalami pertumbuhan paling besar 10,32% dan disusul dengan sektor perdagangan dan sektor listrik, gas, air minum masing-masing sebesar 5,73% dan 5,72%. Sedangkan sektor pertanian yang sebelumnya tumbuh negatif, pada tahun mampu tumbuh positif sebesar 4,85%.

TABEL 2.2

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN
USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN DASAR 1993, DI
PROP. D.I. YOGYAKARTA
(000.000)
TAHUN 1998-2003**

	Sebelum Otonomi Daerah			Sesudah Otonomi Daerah		
Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	Rp 778.139	Rp 817.810	Rp 901.380	Rp 886.990	Rp 865.775	Rp 907.797
Pertambangan dan Penggalian	Rp 60.251	Rp 60.476	Rp 60.555	Rp 60.917	Rp 61.018	Rp 61.590
Industri Pengolahan	Rp 659.816	Rp 582.440	Rp 664.115	Rp 677.486	Rp 704.400	Rp 721.162
Listrik, Gas dan Air bersih	Rp 31.429	Rp 35.344	Rp 38.128	Rp 39.004	Rp 40.547	Rp 42.867
Bangunan	Rp 317.345	Rp 383.269	Rp 400.859	Rp 412.355	Rp 455.046	Rp 501.993
Perdagangan hotel dan Restoran	Rp 742.580	Rp 761.008	Rp 791.621	Rp 846.634	Rp 870.986	Rp 920.864
Pengangkutan dan komunikasi	Rp 541.280	Rp 552.812	Rp 609.593	Rp 672.922	Rp 706.728	Rp 723.207
Keungan dan jasa Perusahaan	Rp 527.472	Rp 531.007	Rp 524.512	Rp 543.471	Rp 603.889	Rp 633.966
Jasa-jasa	Rp 977.631	Rp 1.000.279	Rp 1.026.947	Rp 1.042.764	Rp 1.086.665	Rp 1.102.111
Jumlah	Rp 4.685.777	Rp 4.824.445	Rp 5.017.709	Rp 5.182.544	Rp 5.395.054	Rp 5.615.557

Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998 sampai 2003.

2.2.2. Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pelaporan yang standar diperlukan untuk pemantauan posisi keuangan suatu wilayah dengan memperhatikan aspek efisiensi penggunaan keuangan publik. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap realisasi hasil pembangunan dengan anggaran yang diserap.

Pada tahun 1998 jumlah penerimaan Propinsi D.I.Yogyakarta Rp 135,72 Milyar yang berarti turun 54,03% dari tahun sebelumnya, hal ini terutama dikarenakan dari Pendapatan asli Daerah (PAD) menurun 36,46% serta bagian sumbangan bantuan menurun 54,03%.

Pada tahun 1999 jumlah penerimaan Propinsi D.I.Yogyakarta naik 6,31% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama dikarenakan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 8,10% dan bagian sumbangan dan bantuan naik 38,28%.

Pada tahun 2000 jumlah penerimaan Propinsi D.I.Yogyakarta turun 9,47% dari tahun sebelumnya, hal ini terutama dikarenakan dari Pendapatan asli Daerah (PAD) menurun 30,31% serta bagian bagi hasil pajak/bukan pajak turun 46,36%.

Berdasarkan data perubahan RAPBD Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2001, penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 416,91 milyar, naik 73,97% dibanding realisasi tahun 2000 yang sebesar Rp 236,64 milyar. Sebagian besar penerimaan berasal dari sumbangan dan bantuan yang mencapai 53,23%, disusul Pendapatan Asli Daerah 31,04%.

Berdasarkan data RAPBD Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2002, penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 456,77 milyar, naik 5,44% dibanding

realisasi tahun 2001 yang sebesar Rp 456,77 milyar. Sebagian besar penerimaan berasal Dana Alokasi Umum (Sumbangan) mencapai 44,53%, disusul Pendapatan Asli Daerah 35,19%.

Berdasarkan data RAPBD Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2003, rencana penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 524,49 milyar, naik 8,90 persen dibanding realisasi tahun 2002 yang sebesar Rp 481,64 milyar. Sebagian besar penerimaan berasal Dana Alokasi Umum (Sumbangan) mencapai 40,89 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah 39,75 persen.

TABEL 2.3
PENERIMAAN ASLI DAERAH OTONOM PROPINSI D.I.Yogyakarta
(000 000Rp)
TAHUN 1998 – 2003

Rincian	Sebelum Otonomi Daerah			Setelah Otonomi Daerah		
	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PAD	Rp 40.594	Rp 57.877	Rp 84.225	Rp 142.284	Rp 169.489	Rp 208.475
a. Pajak	Rp 34.136	Rp 49.469	Rp 74.226	Rp 123.516	Rp 151.400	Rp 181.334
b. Retribusi Daerah	Rp 1.226	Rp 2.419	Rp 2.631	Rp 3.964	Rp 4.049	Rp 7.965
c. Laba BUMD	Rp 3.288	Rp 4.846	Rp 4.674	Rp 4.385	Rp 7.577	Rp 8.168
d. Penerimaan dr Dinas	Rp 786	-	-	-	-	-
e. Penerimaan lainnya	Rp 1.156	Rp 1.143	Rp 2.694	Rp 10.418	Rp 6.461	Rp 11.006

Sumber D.I.Yogyakarta Dalam Angka 1998 sampai 2003

2.2.3. Penanaman Modal Dalam Negeri.

Investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 1999 terealisasi 88,10% dari rencana investasi sebesar Rp 1,32 Trilyun dengan alokasi 3,72% untuk sektor primer, 20,05% sektor sekunder, dan 76,22% sektor tersier. Jumlah tenaga kerja terserap PMDN adalah TKI 22.218 orang dan TKA 12 orang.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2000 terealisasi 100,70% dari rencana investasi sebesar Rp 1,82 Trilyun dengan alokasi 2,2% untuk sektor primer, 37,97% sektor sekunder, dan 59,33% sektor tersier. Jumlah tenaga kerja terserap PMDN adalah TKI 24.000 orang dan TKA 10 orang.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk Propinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2001 sebesar Rp 1,94 Trilyun dari rencana investasi sebesar Rp 1,96 Trilyun atau 98,81% dari rencana yang ditetapkan.

Sebagian besar investasi yang masuk ditanam di sektor tersier (listrik, bangunan, jasa-jasa) sekitar 56%, di sektor sekunder (industri) 48,%, dan sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya 1%. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dengan investasi tersebut sebanyak 25.569 TKI dan 18 orang tenaga kerja asing.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk Propinsi D.I. Yogyakarta dengan tahun 2002 sebesar Rp 1,96 Trilyun dari rencana investasi sebesar Rp 2,02 Trilyun atau 97,21% dari rencana yang ditetapkan.

Sebagian besar investasi dalam negeri yang masuk ditanam di sektor tersier (listrik, bangunan, jasa-jasa) sekitar 56%, di sektor sekunder (industri) 42%, dan sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya 2%. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dengan investasi tersebut sebanyak 25.484 TKI dan 18 orang tenaga kerja asing.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk Propinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp 2,41 Trilyun dari rencana investasi sebesar Rp 2,03 Trilyun atau 118,60 % dari rencana yang ditetapkan.

Sebagian besar investasi dalam negeri yang masuk ditanam di sektor tersier (listrik, bangunan, jasa-jasa) sekitar 49,65 %, di sektor sekunder (industri) 48,34%, dan sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya 2,01 %. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dengan investasi tersebut sebanyak 27.249 TKI dan 18 orang tenaga kerja asing.

TABEL 2.4
KUMULATIF PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENURUT
SEKTOR DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
(000.000)
TAHUN 1999 – 2003

Sektor	Sebelum OTDA		Sesudah Otonomi Daerah		
	1999	2000	2001	2002	2003
Primer	Rp 49.254	Rp 49.093	Rp 48.105	Rp 48.103	Rp 48.316
1. Tan. Pangan	Rp 1.971	Rp 1.971	Rp 1.029	Rp 1.029	Rp 1.029
2. Perkebunan	Rp 105	Rp 105	Rp 105	Rp 105	Rp 105
3. Peternakan	Rp 46.240	Rp 46.078	Rp 46.033	Rp 46.031	Rp 46.031
4. Perikanan	Rp 400	Rp 400	Rp 400	Rp 400	Rp 400
5. Kehutanan	-	-	-	-	-
6. Pertambangan	Rp 1.256	Rp 537	Rp 537	Rp 537	Rp 750
Sekunder	Rp 400.283	Rp 689.178	Rp 819.787	Rp 825.569	Rp 1.162.752
1. Ind. mkanan	Rp 55.095	Rp 422.958	Rp 444.014	Rp 415.662	Rp 415.971
2. Ind. Tekstil	Rp 195.392	Rp 201.501	Rp 287.040	Rp 301.069	Rp 608.077
3. Ind. Kayu	-	-	-	-	-
4. Ind. Kertas	Rp 5.952	Rp 443	Rp 443	Rp 443	Rp 443
5. Ind. Farmasi	-	-	-	-	-
6. Ind. Kimia	Rp 231	Rp 231	Rp 231	Rp 231	Rp 231
7. Ind. Tambng	-	-	-	-	-
8. Ind. Logam dasar	-	Rp 1.47	Rp 1.547	Rp 1.547	Rp 1.547
9. Ind. Brg Logam	Rp 8.571	Rp 13.294	Rp 13.294	Rp 13.294	Rp 13.294
10. Ind. Lainnya	-	Rp 49.200	Rp 73.215	Rp 93.320	Rp 123.185
Tersier	Rp 100.808	Rp 1.076.911	Rp 1.073.452	Rp 1.088.059	Rp 1.194.205
1. Listrik, gas, air	Rp 7.500	Rp 1.325	Rp 1.095	Rp 1.095	Rp 1.095
2. Bangunan	Rp 37.460	-	-	-	-
3. Perdagangan	Rp 833.563	Rp 13.479	Rp 13.615	Rp 13.888	Rp 20.865
4. Hotel Restrn	Rp 30.432	Rp 898.724	Rp 883.969	Rp 883.969	Rp 885.756
5. Pengngkutan	-	Rp 30.974	Rp 29.167	Rp 33.319	Rp 34.099
6. Perumahan	-	-	-	-	-
7. Perkantoran	Rp 99.130	-	-	-	-
8. Jasa Lainnya	-	Rp 132.407	Rp 145.605	Rp 155.787	Rp 252.480
Jumlah	Rp 1.322.585	Rp 1.815.182	Rp 1.941.346	Rp 1.961.732	Rp 2.405.274

Sumber D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1999 sampai 2003

2.2.4. Penanaman Modal Asing.

Investasi atau Penanaman Modal Asing di Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 1998 terealisasi 35,43% dari rencana investasi sebesar 395.347.130 US\$ dengan alokasi 0,01% untuk sektor primer, 10,81% sektor sekunder, dan 89,18% sektor tersier. Jumlah tenaga kerja terserap PMA adalah TKI 3.912 orang dan TKA 47 orang.

Investasi atau Penanaman Modal Asing di Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 1999 terealisasi 33,28% dari rencana investasi sebesar 388.029.703 US\$ dengan alokasi 0,01% untuk sektor primer, 10,81% sektor sekunder, dan 89,18% sektor tersier. Jumlah tenaga kerja terserap PMA adalah TKI 4627 orang dan TKA 49 orang.

Penanaman Modal Asing yang masuk Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2000 terealisasi 10,79% dari rencana investasi sebesar 936.844.199 US\$ dengan alokasi 0,32% untuk sektor primer, 27,05% sektor sekunder, dan 10,03% sektor tersier. Jumlah tenaga kerja terserap PMA adalah TKI 6391 orang dan TKA 70 orang.

Realisasi kumulatif investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode 2001 mencapai US\$ 123,16 juta dari rencana sebesar US\$ 221,27 juta atau 55,66% dari rencana. Minat investor asing terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan hotel yang mencapai US\$ 86,57 juta atau sekitar 70% dari total realisasi PMA. (dengan asumsi untuk tahun 2001 rata-rata US\$ 1 = Rp 10.175).

Realisasi kumulatif investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode 2002 mencapai 45,58% atau tercatat sebesar US\$ 106,48 juta dari rencana

sebesar US\$ 233,62 juta. Minat investor asing terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan hotel yang mencapai US\$ 84,98 juta atau sekitar 80% dari total realisasi PMA.

Realisasi kumulatif investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode 2003 mencapai 65,17 % atau tercatat sebesar US\$ 140,04 juta dari rencana sebesar US\$ 263,83 juta. Minat investor asing terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan hotel yang mencapai US\$ 114,61 juta atau sekitar 81,84 % dari total realisasi PMA.

TABEL 2.5

**KUMULATIF PENANAMAN MODAL ASING MENURUT SEKTOR DI
PROPINSI D.I. YOGYAKARTA.
TAHUN 1999 – 2003
(US \$)**

Sektor	Sebelum Otonomi Daerah		Sesudah Otonomi Daerah		
	1999	2000	2001	2002	2003
Primer	16.900	33.500	129.850	236.900	3.749.470
1. Tan. Pangan	-	-	79.750	186.800	200.600
2. Perkebunan	-	-	-	-	-
3. Peternakan	-	-	-	-	3.473.870
4. Perikanan	16.900	33.500	50.100	50.100	75.000
5. Kehutanan	-	-	-	-	-
6. Pertambangan	-	-	-	-	-
Sekunder	13.958.166	12.861.801	13.785.246	16.561.430	16.654.125
1. Ind. makanan	-	-	-	-	-
2. Ind. Tekstil	1.927.517	1.180.720	1.542.429	2.167.669	3.008.434
3. Ind. Kayu	-	-	--	-	-
4. Ind. Kertas	-	-	-	-	-
5. Ind. Farmasi	-	-	-	-	-
6. Ind. Kimia	-	-	-	-	-
7. Ind. Tambng	-	-	-	-	-
8. Ind. Logam dasar	-	337.141	337.141	1.040.404	1.040.404
9. Ind. Barang Logam	-	-	-	-	-
10. Ind. Lainnya	12.030.649	11.343.940	12.867.214	13.353.357	13.671.919

Tersier	115.166.592	88.166.127	110.928.067	89.680.238	119.631.461
1. Listrik, gas, air	-	-	68.924	39.211	39.211
2. Bangunan	1.704.861	53.240	53.240	53.240	53.240
3. Perdagangan	1.704.861	46.647.691	48.419.691	46.060.691	75.687.685
4. Hotel Restrn	46.100.000	38.884.565	39.141.927	38.917.220	38.917.220
5. Pengngkutan	776.550	47.220	66.397	79.880	109.110
6. Perumahan	-	-	-	-	-
7. Perkantoran	-	-	-	-	-
8. Jasa Lainnya	64.880.320	2.533.320	23.173.562	104.989.995	4.824.996
Jumlah	129.141.658	101.061.428	125.804.700	106.478.568	140..035..056

Sumber D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1999 sampai 2003



BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Tujuan diadakanya kajian pustaka adalah mendokumentasikan dan mengkaji hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang pernah ada pada area atau tema yang hampir sama. Kajian pustaka diarahkan untuk mendapatkan landasan teori dan literatur yang relevan dan analisis yang digunakan, dan dasar-dasar teori dari sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Dalam bab ini berusaha untuk mencari kelebihan dan kelemahan yang dilakuakn oleh masing-masing peneliti sebelumnya. Bercermin dari hasil penelitian sebelumnya tersebut selanjutnya berusaha untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian yang meliputi waktu penelitian yang berbeda yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang hampir sama adalah sebagai berikut:

1. Dalam bukunya Abdul Halim, “Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah” Penelitian yang dilakukan Oleh Aswarodi dengan Judul Analisis perimbangan Keuangan pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah pemberlakuan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan diberlakukanya Undang-undang nomor 25 Tahun 1999, bagi Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan lebih menguntungkan, karena penerimaanya meningkat cukup signifikan dari Rp 110.728.529.000 menjadi Rp 256.944.558.000 atau meningkat sebesar 132.04%,

- b. Berdasarkan analisis, proses perimbangan keuangan di daerah kabupaten lampung selatan secara fundamental hanya berubah pada komponen-komponen *non tax sharing* yang pada umumnya berasal peningkatan bantuan pemerintah pusat dan dari hasil sumber daya alam.
 - c. Keberadaan undang-undang nomor 25 tahun 1999, bukan merupakan *the best solution* yang langsung dapat menciptakan perubahan besar terhadap daerah. Namun harus disepakati bahwa dengan keberadaan undang-undang tersebut dari segi pengelolaan dan penerimaan keuangan bagi daerah akan lebih dibandingkan sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Doddy Fabeanto, dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Di Propinsi D.I.Y. periode 1987-2002. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PMDN dan PMA tidak mempengaruhi besar kecilnya atau peningkatan penurunan PDRB D.I.Y. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu tidak terbukti, dimana dugaan awal menyebutkan jika variabel PMDN dan PMA berpengaruh positif terhadap PDRB D.I.Y.

Ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh. Kondisi ini bermakna bahwa propinsi DIY dalam meningkatkan nilai PDRB-nya tidak harus sepenuhnya memperhatikan kontribusi dari para investor dalam negeri ataupun investor asing dalam menanamkan modalnya, karena laju inflasi yang stabil dan tenaga kerja yang

produktif juga bisa mempengaruhi PDRB. Kontribusi yang kurang tersebut, bisa dikarenakan masih sedikitnya nilai investasi dari proyek-proyek PMDN ataupun PMA para investor di propinsi D.I.Y. Simpulanya adalah faktor investasi swasta baik PMDN maupun PMA untuk kasus di D.I. Yogyakarta masih belum bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan ketiga faktor lainnya dalam penelitian ini.

3. Penelitian yang dilakukan Singgih santoso dalam bukunya yang berjudul SPSS Versi 10 dalam analisis Paired Sample T-Test, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Pada bagian pertama terlihat ringkasan statistik dari kedua sample. Untuk berat badan sebelum minum obat, konsumen mempunyai berat rata-rata 84,5100 kilogram. Sedangkan setelah minum obat, konsumen mempunyai berat rata-rata 83,3090 kilogram.
 - b) Pada bagian kedua output adalah hasil korelasi antara kedua variabel, yang menghasilkan angka 0.943 dengan nilai probabilitas jauh dibawah 0.05, Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara berat sebelum dan sesudah minum obat adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata.
 - c) pada bagian ketiga adalah pengambilan keputusan yaitu terlihat bahwa t hitung adalah 1,646 dengan probabilitas 0.134. Oleh karena probabilitas > 0.05 , maka H_0 diterima, atau berat badan sebelum dan sesudah minum obat relatif sama. Dengan kata lain, obat penurun berat tersebut tidak efektif dalam menurunkan berat badan secara nyata.

4. Dalam bukunya Abdul Halim “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati, dengan Judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam menghadapi Otonomi Daerah. (Kasus Kabupaten Malang). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keberhasilan Otonomi Daerah diperlakukan kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dari segi keuangan yang merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat dicapai kemandirian.

Berdasarkan hasil analisis, kesiapan pemerintah Kabupaten Malang dari sisi keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dari proporsi PAD terhadap APBD rata-rata selama kurun waktu lima tahun 1995-2000 sebesar 15%, sedangkan proporsi PAD + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB sebesar 29% dan jika dilihat setiap tahunnya selalu mengalami penurunan.
- b. Jika dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata selama lima tahun sebesar 32% dan jika ditambah dengan hasil dari bagi hasil pajak/bukan pajak mencapai 62 %. Hal ini berindikasi bahwa dalam pembiayaan belanja rutinpun masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.

- c. Posisi fiskal yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata perubahan PDRB selama kurun waktu lima tahun menunjukkan hasil yang berbeda. Jika digunakan PDRB harga konstan, maka struktur PAD cukup baik dengan hasil 4,24(elastis), tetapi jika digunakan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan hasil yang kurang baik yaitu sebesar 0.63 (inelastis).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rahmadi, dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dana tabungan dan kredit di bank mandiri syariah sebelum dan sesudah keluarnya fatwa MUI melalui pendekatan Paired Samples T- Test : Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- Dana Tabungan pada Bank Mandiri Syariah Sebelum dan Sesudah keluarnya fatwa MUI relatif sama, dengan kata lain keluarnya fatwa MUI tersebut tidak menunjukkan terjadinya Rush (tidak terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh para nasabah Bank mandiri Syariah atau perpindahan dana ke bank mandiri syariah dari bank lain).
 - Posisi Kredit pada Bank Mandiri Syariah Sebelum dan Sesudah keluarnya fatwa MUI relatif sama, dengan kata lain keluarnya fatwa MUI tersebut tidak menunjukkan perubahan posisi dana kredit di bank mandiri syariah .

6. Dalam bukunya Abdul Halim, "Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah" Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Da Silva, dengan Judul Analisis Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tahun Anggaran 2001, Suatu Studi Dalam Rangka Otonomi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan Daerah selama periode analisis, rata-rata setiap tahunnya mencapai sebesar 4,13%.
- b. Pertumbuhan PAD Kabupaten Sikka dalam kurun waktu analisis yaitu dari Tahun anggaran 1995/1996 s/d Tahun Anggaran 2000 rata-rata sebesar 20,03%, sedangkan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka mencapai 33,13%.
- c. Tingkat kemandirian Kabupaten Sikka ditinjau dari aspek pendanaan yang bersumber dari PAD baru mencapai 4,13%, hal mana memberikan suatu indikasi bahwa Kabupaten Sikka masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

7. Dalam bukunya Abdul Halim, "Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah" Penelitian yang dilakukan oleh Ramdan Ruhedi Dedy, dengan judul Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab salah satu syarat yang diperlukan adalah tersedianya sumber-

sumber pembiayaan, sumber pembiayaan tersebut disamping sumber pembiayaan dari pemerintah diatasnya yaitu berupa dana perimbangan juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka sumber pembiayaan dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan agar kemandirian dan Otonomi yang luas, Nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
- c. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan, sehingga setiap pungutan pendapatan asli daerah perlu diadakan penilaian sesuai kriteria penerimaan seperti kriteria hasil dan elastisitas, keadilan, efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakanya dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.
- d. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan melalui kegiatan baik mencakup aspek kelembagaanya, aspek ketatalaksanaanya maupun aspek personalianya. Sedangkan upaya ekstensifikasi (menggali sumber-sumber PAD yang Baru) masih dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Melalui penelitian sebelumnya yang diambil dari beberapa judul kebanyakan hanya menganalisis kesiapan untuk menghadapi otonomi daerah. Dalam penelitian yang akan penulis teliti mencakup keadaan sebelum dan keadaan sesudah diberlakukannya otonomi daerah dengan variabel pembanding PMA, PMDN, PDRB, PAD dan menggunakan alat analisis Paired Samples T-Test.



BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU No.32/2004) tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (UU No.33/2004) tentang rancangan kebijakan terhadap pemerintah daerah yang dinyatakan dalam Bab XIII pasal 224 ayat (1) dan ayat (2), yaitu (UU OTDA, 2004: hal 131) :

- a). Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- b). Ayat (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan :
 - a. Pembentukan, Penyempurnaan, dan Penggabungan Daerah serta pembentukan kawasan khusus.
 - b. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi:
 - a. Perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing daerah berdasarkan besaran DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasar besaran DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan yang mendasar atas disahkannya kedua UU tersebut adalah pada terdapatnya kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah. Karena pengelolaan keuangan daerah menjadi isi dan isu utama otonomi daerah, maka fungsi keuangan menjadi sangat penting bagi daerah sebab keuangan merupakan motor bagi penggerak roda perekonomian daerah yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan daerah, maka organisasi pengelola keuangan juga akan mengalami perubahan.

Tujuan otonomi daerah menurut Smith, dalam sebuah analisis yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu:

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui Otonomi Daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah.

- b. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan Otonomi Daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan, dan bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. Uraian tersebut adalah merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan

sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai penggerak jalannya pemerintahan daerah (Abdul Halim, 2004:23).

4.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya yang tentunya ditindak lanjuti yaitu dengan memberikan kompensasi berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Adapun PAD berdasarkan pada UU No 33 Tahun 2004 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka daerah lebih leluasa mengelola daerahnya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Sehingga diharapkan daerah mampu meningkatkan Penerimaan Daerah khususnya penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya PAD diharapkan pemberlakuan Otonomi Daerah dapat tercapai maksud dan tujuannya.

4.3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Dari PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertumbuhan riil *size* ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Ada tiga macam pendekatan perhitungan PDRB yaitu:

- a. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau regional pada suatu jangka waktu tertentu biasanya setahun.

- b. Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi disuatu wilayah atau regional pada jangka waktu tertentu (setahun), balas jasa faktor produksi tersebut adalah Upah dan Gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan.
- c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, dan swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto disuatu wilayah atau region. Ekspor netto disini adalah ekspor dikurangi impor

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi PDRB atas dasar harga pasar karena masih mencakup komponen pajak tak langsung netto.

Dengan diberlakukanya Otonomi Daerah diharapkan daerah mampu bersaing dengan daerah lain dengan cara menggali sumber daya yang dulunya kurang produktif sehingga dimanfaatkan untuk menambah pemasukan PDRB, sehingga diharapkan PDRB mampu menjadi andalan pembangunan di daerah tersebut.

4.4. Investasi.

4.4.1. Pengertian Investasi.

Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang (abdul halim 2003:2).

Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno 2001:107).

4.4.2 Fungsi Investasi.

Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukan perkaitan diantara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional (Sadono Sukirno 2001:107).

Bentuk Investasi dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar yang dinamakan Investasi Otonomi.
- b. Fungsi Investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat, yang dinamakan Investasi Terpengaruh.

4.4.3 Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Investasi. (Sadono Sukirno 2001:109).

- a. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
- b. Tingkat Bunga.
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.
- d. Kemajuan teknologi.
- e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.

f. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah perizinan untuk melakukan investasi bagi para investor asing harus lewat persetujuan dari presiden. Tetapi setelah diberlakukannya Otonomi Daerah urusan perizinan dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat baik gubernur atau walikota/bupati. Dengan pelimpahan wewenang diharapkan Daerah Otonom mampu menarik investor asing maupun investor dalam negeri.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, maka diharapkan Investor mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk melakukan investasi di daerah karena tidak perlu mengurus perizinan ke pusat cukup melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di daerah itu sendiri. Karena dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota juga dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Kepres No 29 Tahun 2004 Bab II Pasal 2 huruf c Kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip/izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin

Usaha Tetap. Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal adalah izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan lebih lanjut atas surat persetujuan Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

4.5. Pembangunan Ekonomi Daerah

Adanya pembangunan ekonomi daerah akan meningkatkan output masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk dapat menjabarkan kebijakan nasional ditingkat daerah diperlukan adanya suatu wawasan wilayah dengan pola orientasi pengembangan potensi yang ada, serta dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan disegala bidang dan sektor.

Pembangunan ekonomi daerah disamping akan menghasilkan output yang lebih banyak juga akan menciptakan perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan penguasaan teknologi. Mununjukkan teknologi yang begitu pesat dan meningkatkannya pembangunan disegala bidang dipandang telah mempercepat masalah-masalah dibidang sosial ekonomi dikalangan masyarakat. Timbulnya masalah-masalah tersebut akibat dari penggunaan ruang yang begitu meningkat. Kebutuhan ruang dalam hal ini untuk penambahan bangunan dan penambahan sarana fisik. penambahan bangunan diwujudkan dalam bentuk

bangunan, perumahan, sarana fisik dan sarana transportasi. Pertambahan sarana pelayanan fisik diwujudkan dalam bentuk pertokoan, penginapan, pasar, dan lain-lain. Kesemuanya itu tidak lepas dari kebutuhan daerah setempat .

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya daerah tidak semata-mata merupakan retorika baru tetapi mewakili sebuah perubahan yang fundamental pada para pelakunya seperti halnya kegiatan yang dihubungkan pada kegiatan ekonomi, pada pokoknya pembangunan ekonomi daerah adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintahan daerah atau kelompok berbasis masyarakat yang mengelola sumberdaya yang ada dan memasuki kemitraan dengan sektor swasta atau saling timbal balik untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang aktifitas ekonomi dalam wilayah ekonomi yang telah ditetapkan dengan baik.

Pembangunan ekonomi daerah adalah pembangunan yang berorientasi pada proses, oleh karena itu pembangunan ekonomi daerah merupakan perubahan yang melibatkan proses formasi, pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas pekerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, transfer ilmu pengetahuan dan membina perusahaan-perusahaan baru.

Dalam bentuk apapun pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan pekerja yang tersedia bagi penduduk daerah. untuk mewujudkan hal ini pemerintah daerah dan kecamatan masih harus mengambil peran yang aktif (Arsyad, 1997: 274-280).

4.6. Pengertian Pembangunan

Definisi pembangunan ekonomi mengalami perkembangan dinamis, karena permasalahan yang dihadapi juga berkembang. Persoalan-persoalan yang terjadi merupakan masalah pokok pembangunan (pertumbuhan ekonomi) ternyata memunculkan persoalan baru yang tidak kalah rumit.

Pengertian pembangunan selama dua dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi nasional di mana keadaan ekonomi mula-mula kurang lebih statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikkan dan mempertahankan suatu kenaikan *Gross National Product* (GNP) antara 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada kenaikan GDP saja tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan. Hal ini terlihat pada taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan GDP pertahun tetap tercapai (Arsyad, 1997:10).

Pengertian pembangunan sangatlah luas bukan hanya sekedar menaikkan GDP per tahun saja. Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.

Definisi diatas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan:

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita
- c. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbul perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/GNP.

Pertambahan GDP/GNP mempunyai kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Dalam jangka waktu tertentu, pada saat GDP/GNP dihitung, disamping akan terdapat pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi masyarakat pertumbuhan penduduk pun terjadi. Dengan demikian, sebagian pertumbuhan hasil kegiatan ekonomi tersebut harus digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika tingkat pertumbuhan GDP/GNP sama dengan atau lebih rendah dari pada

pertambahan penduduk, berarti pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 1997:11).

Kemungkinan timbulnya keadaan seperti diatas, maka beberapa ekonom memberikan perbedaan pengertian pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Para ekonom yang membedakan kedua istilah tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai:

- a. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.
- b. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Berdasarkan kriteria pembangunan terdapat situasi keterbelakangan yang sesungguhnya tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi atau sekedar soal pengukuran tingkat pendapatan, masalah ketenagakerjaan, atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif. Keterbelakangan sebuah pembangunan merupakan kenyataan riil dalam kehidupan sehari-hari bagi lebih dari 3 milyar orang di dunia ini. Yang dimaksud dengan keterbelakangan di sini bukan hanya angka-angka kemiskinan nasional, melainkan juga menyangkut

keterbatasan berfikir penduduk miskin di negara-negara terbelakang yang bersangkutan (Todaro, 2000:19).

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2000:20).

4.7. Indikator Pembangunan

Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Penekanan pada kenaikan pendapatan per kapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk) dan tidak hanya kenaikan pendapatan nasional riil menyiratkan bahwa perhatian pembangunan bagi negara miskin adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Pendapatan nasional riil (atau GNP pada harga konstan) yang meningkat seringkali tidak diikuti dengan perbaikan kualitas hidup. Bila pertumbuhan penduduk melebihi atau sama dengan pertumbuhan pendapatann nasional maka

pendapatan per kapita bisa turun atau tidak berubah, dan jelas ini tidak dapat disebut ada pembangunan ekonomi.

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncuro, 2004: 63):

- a. Ketahanan (*Sustenance*): Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (*Self Esteem*): Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- c. Kebebasan (*Freedom From Servitude*): kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

4.8. Dualisme Regional dalam Pembangunan

Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial-ekonomi Negara Sedang Berkembang (NSB). Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Konsep dualisme mempunyai 4 unsur pokok, yaitu (Arsyad, 1997:229):

Dua keadaan yang berbeda di mana sebagian bersifat "*superior*" dan lainnya bersifat "*inferior*" yang dapat hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama, misalnya hidup berdampingan antar metode produksi modern dan

tradisional pada sektor perkotaan dan pedesaan, antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang berpendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan sama sekali, antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara yang lemah. Semua itu merupakan penjelmaan dari keadaan yang dualistik.

Kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. Keadaan tersebut bukan fenomena yang sementara, yang karena waktu, perbedaan antara keadaan yang superior dengan inferior itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, hidup berdampingan antara kemakmuran dan kemiskian secara internasional bukanlah fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata.

Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju dengan di NSB tampak semakin jauh dari tahun ketahun.

Keterkaitan antara unsur *superior* dan unsur *inferior* tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur *superior* tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur *inferior*. Bahkan kenyataannya, unsur yang *superior* tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan.

Konsep regional, dualisme regional ini banyak dibicarakan para ahli sejak tahun 1960-an. Pengertian dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara.

Ketidakseimbangan ini sebenarnya terdapat juga di negara-negara maju, tetapi keadaannya tidaklah separah seperti yang terjadi di NSB. Selain itu, di negara-negara maju ketidakseimbangan itu cenderung bertambah kecil.

Di Negara Sedang Berkembang keadaannya berbeda. Di NSB, pada tahap awal proses pembangunannya, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah semakin buruk dibandingkan pada masa lalu. Ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga banyak diantaranya mencapai keadaan ekonomi dan sosial yang sudah mendekati maju, sedangkan di lain daerah perkembangannya sangat lambat dan bahkan mungkin mengalami kemunduran.

Dualisme regional ini dapat mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan (*gap*) tingkat kesejahteraan antara daerah. Selain itu, dualisme regional yang semakin buruk juga bisa menimbulkan masalah-masalah sosial politik yang dapat menghambat usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Negara Sedang Berkembang (Arsyad, 1997:235).

Dualisme regional di NSB dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan
- b. Dualisme antara pusat negara, pusat industri, dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut.

Kedua jenis dualisme tersebut timbul terutama sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antar daerah perkotaan dan daerah pertanian (pedesaan). Ketidakseimbangan tersebut akhirnya menyebabkan kesenjangan atau

ketimpangan antara pusat negara dengan daerah-daerah lainnya dan antara daerah perkotaan dengan pedesaan bertambah besar.

4.9. Pembangunan, Distribusi, dan Ketimpangan Pendapatan

Kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan dan kemampuan pemerintah yang digariskan dalam RAPBD maupun RAPBN. Langkah tersebut dilandasi pemikiran bahwa dalam suatu sistem. Peranan dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan melalui pelimpahan tanggungjawab pemerintah. Pembangunan bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan ekonomi biasanya diikuti bertambahnya ketimpangan atau kesenjangan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan kegiatan pembangunan yang terpusat pada daerah-daerah yang pendapatan lebih. Dimana kelebihan tersebut yang memiliki potensi yang merangsang berkembangnya perekonomian, akibatnya terjadi perbedaan pendapatan per kapita dan taraf hidup yang mencolok.

Menurut ekonomi klasik memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai tingkat keseimbangan alami jika modal dapat mengalir tanpa *ristriksi* (pembatasan). Oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah yang upah tinggi ke daerah yang berupah rendah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan.

Singer mengkritik pandangan tersebut di atas atau pandangan yang menekankan pada terciptanya pembangunan yang berbarengan pada berbagai industri. Kritik utama singer adalah mengenai corak program pembangunan yang harus dilaksanakan di berbagai sektor. Dan menurut Hirschman strategi pembangunan seimbang merupakan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa secara *gradual* (perlahan) kegiatan industri moderen telah berkembang pada masa lalu.

Hircman mengemukakan pendapatan mengenai corak pembangunan yang tidak seimbang. Pada awal perkembangan ekonomi akan terpusat, sehingga akan membuat jurang atau perbedaan. Pembangunan yang tidak seimbang ini akan menciptakan gangguan oleh ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian pembangunan yang tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

Menurut Mirdal ada dua faktor yang menyebabkan ketidak seimbangan, yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Suatu perbedaan antara yang sejahtera dan tidak sejahtera. Hal ini sebagai akibat mekanisme pasar yang tidak mampu mengatasi perbedaan tingkat pembangunan yang makin melebar, maka diperlukan campur tangan pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan pembangunan dan mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

Peningkatan GNP riil yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dan indikasi untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Dan meningkatnya pendapatan riil atau pendapatan per

kapita atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar tertentu, merupakan salah satu ukuran kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita itu, yaitu pendapatan rata-rat penduduk, belumlah mencerminkan terdistribusinya secara merata pendapatan daerah masyarakat yang bersangkutan.

Kelompok kecil masyarakat ada yang memperoleh keuntungan besar dari hasil pembangunan. Namun kelompok masyarakat lainnya hampir tidak merasakan peningkatan kesejahteraannya, sehingga mereka tetap saja hidup dalam kemelaratan. Jika hal tersebut yang terjadi dikatakan pendapatan nasional atau kenaikan pendapatan nasional yang terjadi tidak terdistribusi dengan merata antar kelompok pendapatan dalam masyarakat. Dikatakan terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat, sehingga perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok kaya dengan kelompok miskin dalam proses pembangunan bisa tidak membaik bahkan bisa menjadi memburuk (Todaro, 2000:191-205).

4.10. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh. Hipotesis dari analisis dalam penelitian ini adalah

1. Diduga ada perbedaan rata-rata PMA sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga ada perbedaan rata-rata PMDN sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Diduga ada perbedaan rata-rata PDRB sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Diduga ada perbedaan rata-rata PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Metode penelitian

5.1.1. Daerah Penelitian

Daerah penelitian dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1.2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dibuat oleh pihak lain yang didasarkan pada urutan waktu tertentu (Time Series), untuk data sekunder ini penulis memperolehnya dari kantor BPS DIY, Studi Pustaka, dan sumber-sumber lain yang masih berkait.

5.2. Definisi Operasional

Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan karena daerah mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan daerahnya sendiri. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak diberlakukanya otonomi daerah tepatnya pada tanggal 1 januari 2001 (Undang-undang Nomor 22 tahun 1999), banyak mengalami perubahan. Variabel Otonomi Daerah yang dimaksud dalam pengertian ini adalah sebagai berikut:

1. PMA adalah penanaman modal atau investasi yang di lakukan oleh investor asing, dimana investasi dilakukan di wilayah propinsi D.I.Y, dalam bentuk modal barang dan jasa.

TABEL 5.1
PMA D.I.Yogyakarta

Tahun	PMA dalam US \$
1998	140.065.688
1999	129.141.658
2000	101.061.428
2001	125.804.700
2002	106.478.568
2003	140.035.056

Sumber Data: D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998-2003.

2. PMDN adalah penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri, dimana investasi dilakukan di wilayah propinsi D.I.Y dalam bentuk barang dan jasa.

TABEL 5.2
PMDN D.I.Yogyakarta

Tahun	PMDN dalam Rupiah
1998	Rp 1.299.965.604.260
1999	Rp 1.322.585.842.887
2000	Rp 1.815.182.865.869
2001	Rp 1.941.346.291.893
2002	Rp 1.961.732.260.090
2003	Rp 2.405.274.896.484

Sumber Data: D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998-2003.

3. PDRB disini menurut harga konstan, dimana PDRB merupakan produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada kurun waktu

tertentu. Dalam hal ini wilayah yang dimaksud adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TABEL 5.3
PDRB D.I.Yogyakarta

Tahun	PDRB dalam Rupiah
1998	Rp 4.685.777.000.000
1999	Rp 4.824.445.000.000
2000	Rp 5.017.709.000.000
2001	Rp 5.182.544.000.000
2002	Rp 5.395.054.000.000
2003	Rp 5.615.557.000.000

Sumber Data: D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998-2003.

4. **Penerimaan Asli Daerah** adalah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TABEL 5.4
PAD D.I.Yogyakarta

Tahun	PAD dalam Rupiah
1998	Rp 40.594.308.000
1999	Rp 57.877.500.000
2000	Rp 84.225.979.000
2001	Rp 142.284.892.000
2002	Rp 169.489.772.000
2003	Rp 208.475.720.000

Sumber Data: D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998-2003.

5.3. Metode Analisis Data

Sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini, maka alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

5.3.1. Analisis Deskriptif

Yaitu metode analisis dengan pendeskripsian variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pendukung hasil dari analisis kuantitatif.

5.3.2. Analisis Kuantitatif

Yaitu metode analisis yang berhubungan dengan angka dan menggunakan rumus-rumus dan teknik-teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Dalam analisis kuantitatif ini menggunakan analisis Paired Sample T-Test .

5.3.2.1. Uji T Untuk Dua sample yang Berpasangan (Paired)

Paired Sample T-Test merupakan analisis perbandingan untuk dua sample yang berpasangan. Dua sample yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sample dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Dalam analisis Paired Sample T-Test ini ada 3 output (tabel) yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut :

5.3.2.1.1. Output Bagian Pertama (Group Statistics) atau tabel Paired Samples Statistics

Pada bagian tabel Paired Samples Statistics (output 1) yaitu untuk menganalisis Mean (rata-rata) data sebelum diberlakukanya Otonomi Daerah dan data sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah.

5.3.2.1.2. Output Bagian Kedua atau tabel Paired Samples Correlation

Output bagian kedua adalah hasil korelasi antara kedua variabel atau lebih, yang menunjukkan bahwa apabila probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ maka korelasi antara data sebelum dan sesudah adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata, dan sebaliknya apabila probabilitasnya $> 0,05$ maka tidak ada korelasi diantara dua variabel yang diteliti.

5.3.2.1.3. Output Bagian Ketiga atau tabel Paired Samples Test

a. Hipotesis :

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi PMA, PMDN, PDRB, PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah sama/tidak berbeda secara nyata).

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi PMA, PMDN, PDRB, PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah tidak sama/berbeda secara nyata).

b. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan nilai Probabilitas:

- Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima
- Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak

H_0 diterima maksudnya hasil antara variabel PMA, PMDN, PDRB, PAD, sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah relatif sama.

H_0 ditolak maksudnya hasil antara variabel PMA, PMDN, PDRB, PAD, sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah tidak sama.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Metode Analisis untuk mengetahui perbandingan pembangunan daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh hasil sebagai berikut:

6. Uji T Untuk Dua sample yang Berpasangan (Paired)

Paired Sample T-Test merupakan analisis perbandingan untuk dua sample yang berpasangan. Dua sample yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sample dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Dalam analisis Paired Sample T-Test ini ada 3 output (tabel) yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut :

6.1. Output Bagian Pertama (Paired Samples Statistics)

TABEL 6.1
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SBPMA	US \$ 123.422.924.66	3	US \$ 20.121.158.21	US \$ 11.616.956.10
	SDPMA	US \$ 124.106.108.00	3	US \$ 16.842.606.18	US \$ 9.724.083.20
Pair 2	SBPMDN	Rp 1.479.244.771.005.33	3	Rp 291.150.685.186.14	Rp 168.095.926.466.96
	SDPMDN	Rp 2.102.784.482.822.33	3	Rp 262.162.611.164.78	Rp 151.359.654.127.44
Pair 3	SBPDRB	Rp 4.842.643.666.666.67	3	Rp 166.712.647.262.68	Rp 96.251.591.774.42
	SDPDRB	Rp 5.397.718.333.333.33	3	Rp 216.518.794.903.19	Rp 125.007.184.521.97
Pair 4	SBPAD	Rp 60.899.262.333.33	3	Rp 21.972.231.663.22	Rp 12.685.673.865.46
	SDPAD	Rp 173.416.794.666.67	3	Rp 33.269.694.289.24	Rp 19.208.266.953.75

Keterangan:

SBPMA: PMA Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPMA: PMA Sesudah Otonomi daerah diberlakukan.

SBPMDN: PMDN Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPMDN: PMDN Sesudah Otonomi Daerah di berlakukan.

SBPDRB: PDRB Sebelum Otonomi daerah diberlakukan

SDPDRB: PDRB Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

SBPAD: PAD Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPAD: PAD Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

Pada bagian pertama terlihat ringkasan statistik dari kedua sample. Untuk PMA, PMDN, PDRB, PAD sebelum diberlakukanya Otonomi Daerah semuanya mempunyai mean (rata-rata):

1. PMA US \$ 123.422.924.
2. PMDN Rp 1,4 Triliun.
3. PDRB Rp 4,8 Triliun.
4. PAD Rp 60,8 Milyar.

Sedangkan setelah diberlakukanya Otonomi Daerah mempunyai mean (rata-rata) menjadi:

1. PMA, US \$ 124.106.108.
2. PMDN, Rp 2,1 Triliun,
3. PDRB Rp 5,3 Triliun.
4. PAD Rp 173,4 Milyar.

Uji Hipotesis:

1. PMA ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. PMDN ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. PDRB ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. PAD ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6.2. Output Bagian Kedua (Paired Samples Correlations)

Output bagian kedua adalah hasil korelasi antara kedua variabel atau lebih, yang menunjukkan bahwa apabila probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ maka korelasi antara data sebelum dan sesudah adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata, dan sebaliknya apabila probabilitasnya $> 0,05$ maka tidak ada korelasi diantara dua variabel yang diteliti

TABEL 6.2
Paired Samples Correlation

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SBPMA & SDPMA	3	-.633	.564
Pair 2	SBPMDN & SDPMDN	3	1.000	.000
Pair 3	SBPDRB & SDPDRB	3	.996	.053
Pair 4	SBPAD & SDPAD	3	1.000	.011

Keterangan:

SBPMA: PMA Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPMA: PMA Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

SBPMDN: PMDN Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPMDN: PMDN Sesudah Otonomi Daerah di berlakukan.

SBPDRB: PDRB Sebelum Otonomi daerah diberlakukan

~~SDPDRB~~ PDRB Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

SBPAD: PAD Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPAD: PAD Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

Keterangan :

1. Output bagian ini adalah hasil korelasi antara kedua variabel (PMA), yang menghasilkan angka 0.633 dengan nilai probabilitas diatas 0.05 (yaitu 0,564). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara PMA sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah tidak ada dan tidak berhubungan secara nyata.
2. Output bagian ini adalah hasil korelasi antara kedua variabel (PMDN), yang menghasilkan angka 1,000 dengan nilai probabilitas jauh dibawah 0.05 (lihat nilai signifikansi output yang 0.000). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara PMDN sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata.
3. Output bagian ini adalah hasil korelasi antara kedua variabel (PDRB), yang menghasilkan angka 0.996 dengan nilai probabilitas diatas 0.05 (yaitu 0,053). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara PDRB sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah tidak ada dan tidak berhubungan secara nyata.
4. Output bagian ini adalah hasil korelasi antara kedua variabel (PAD), yang menghasilkan angka 1.000 dengan nilai probabilitas dibawah 0.05 (lihat nilai signifikansi output yang 0.011). Hal ini menyatakan bahwa korelasi

antara PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata.

6.3. Output Bagian Ketiga (Paired Samples Test)

TABEL 6.3
Paired samples Test

Paired samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	SBLMPMA	-683.183.33	33.425.550.77	19.298.250.73	-	82.350.487.86	-.035	2	.975
	STLHPMA				83.716.854.53				
Pair 2	SBLMPMDN	-	28.988.075.55	16.736.273.22	-	-	-37.257	2	.001
	STLHPMDN	623.539.711.817.00	5.85	5.46	695.550.083.496.35	551.529.340.137.65			
Pair 3	SBLMPDRB	-	52.300.370.69	30.195.633.09	-	-	-18.383	2	.003
	STLHPDRB	555.074.666.666.67	0.21	6.71	684.995.989.836.74	425.153.343.496.59			
Pair 4	SBLMPAD	-	11.306.790.58	6.527.978.588	-	-	-17.236	2	.003
	STLHPAD	112.517.532.333.33	5.35	12	140.605.157.225.27	84.429.907.441.39			

Keterangan:

SBPMA: PMA Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPMA: PMA Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

SBPMDN: PMDN Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPMDN: PMDN Sesudah Otonomi Daerah di berlakukan.

SBPDRB: PDRB Sebelum Otonomi daerah diberlakukan

SDPDRB: PDRB Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

SBPAD: PAD Sebelum Otonomi Daerah di berlakukan.

SDPAD: PAD Sesudah Otonomi daerah diberlakukan

6.3.1. Hipotesis

Hipotesis untuk kasus ini:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi PMA, PMDN, PDRB, PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah sama/tidak berbeda secara nyata).

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi PMA, PMDN, PDRB, PAD sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah adalah tidak sama/berbeda secara nyata).

6.3.2. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan nilai Probabilitas

- Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima
- Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak

keputusan :

1. Terlihat bahwa t hitung PMA adalah -0.035 dengan probabilitas 0.975 . Karena probabilitas > 0.05 , maka H_0 diterima, atau PMA sebelum dan sesudah diberlakukanya Otonomi Daerah relatif sama. Diduga ada faktor lain yang mempengaruhinya misalnya setelah otonomi daerah para investor asing kesulitan menanamkan modalnya di daerah, kurangnya informasi dari daerah dan juga faktor kepercayaan pada pemerintah daerah.

2. Terlihat bahwa t hitung PMDN adalah $-37,257$ dengan probabilitas $0,001$. Karena probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak, atau PMDN sebelum dan sesudah Otonomi Daerah tidak sama. Diduga Investor dalam negeri lebih cepat mencari informasi karena lebih tahu akan potensi-potensi daerah istimewa Yogyakarta.
3. Terlihat bahwa t hitung PDRB adalah -18.383 dengan probabilitas $0,003$. Karena probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak, atau PDRB sebelum dan sesudah Otonomi Daerah tidak sama. Dengan Otonomi Daerah maka Pemda lebih leluasa menjalankan kebijakan perekonomiannya yang sesuai dengan potensi daerahnya sehingga dapat memacu pertumbuhan PDRB.
4. Terlihat bahwa t hitung PAD adalah $-17,236$ dengan probabilitas $0,003$. Karena probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak, atau PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah tidak sama. Dengan Otonomi daerah Pemda lebih banyak mendapatkan keleluasaan dalam hal penerimaan baik dari segi pajak, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. SIMPULAN

Keberhasilan otonomi daerah diperlukan kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang ada.

Berdasarkan analisis diperoleh pembangunan daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah di Propinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan variabel-variabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilakukan oleh investor asing Di Propinsi D.I.Yogyakarta tidak ada pengaruhnya. Hal ini terlihat dari t hitung yang mencapai $-0,035$ dengan probabilitas 0.975 . dimana angka probabilitas lebih besar dari angka signifikan yaitu 0.05 . maka dapat dikatakan bahwa PMA tidak ada pengaruhnya sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Yogyakarta. Diduga ada faktor lain yang mempengaruhinya misalnya setelah otonomi daerah para investor asing kesulitan menanamkan modalnya didaerah, kurangnya informasi dari daerah dan juga faktor kepercayaan pada pemerintah daerah.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh investor dalam negeri Di Propinsi D.I.Yogyakarta ada pengaruhnya. Hal ini terlihat dari t hitung yang mencapai $-37,259$ dengan probabilitas 0.001 dimana angka probabilitas lebih kecil dari angka signifikan yaitu 0.05. maka dapat dikatakan bahwa PMDN ada pengaruhnya sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Yogyakarta. Diduga Investor dalam negeri lebih cepat mencari informasi karena lebih tahu akan potensi-potensi daerah istimewa yogyakarta.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Propinsi D.I.Yogyakarta ada pengaruhnya. Hal ini terlihat dari t hitung yang mencapai $-18,383$ dengan probabilitas 0.003 dimana angka probabilitas lebih kecil dari angka signifikan yaitu 0.05. maka dapat dikatakan bahwa PDRB ada pengaruhnya sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Yogyakarta. Dengan Otonomi Daerah maka Pemda lebih leluasa menjalankan kebijakan perekonomiannya yang sesuai dengan potensi daerahnya sehingga dapat memacu pertumbuhan PDRB.
4. Penerimaan Asli Daerah (PAD) Di Propinsi D.I.Yogyakarta ada pengaruhnya. Hal ini terlihat dari t hitung yang mencapai $-17,236$ dengan probabilitas 0.003 dimana angka probabilitas lebih kecil dari angka signifikan yaitu 0.05. maka dapat dikatakan bahwa PAD ada pengaruhnya sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi D.I.Yogyakarta. Dengan Otonomi daerah Pemda lebih banyak

mendapatkan keleluasaan dalam hal penerimaan baik dari segi pajak, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

7.2. IMPLIKASI

Wujud Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran. Sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta banyak mengalami perubahan, ini terlihat dari hasil output Paired Samples T-Test dengan membandingkan variabel-variabel PMA, PMDN, PDRB, PAD.

1. Otonomi Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan namun masih ada kekurangan yang harus diperbarui atau direvisi misal dalam hal PMA, setelah diberlakukannya Otonomi Daerah PMA malah semakin menurun jumlahnya. Hal ini pasti ada sebabnya misalkan kurangnya informasi atau sosialisasi, atau juga kepercayaan investor asing kepada pemerintah daerah masih kurang. Sehingga Investor asing tidak begitu tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintah daerah.
2. Perlunya perencanaan yang baik sehingga Otonomi Daerah berjalan sesuai apa yang diharapkan rakyat banyak. Tercapainya pembangunan dan kesejahteraan rakyat kecil.

3. Terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang sah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat D.I.Y pada Khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (1997), "*Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga*" STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998-2003*.
- Fabianto, Doddy. (2005), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Di Propinsi DIY Periode 1987 – 2002, Sripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2005), "*Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program SPSS, EDISI 3*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2003), "*Analisis Investasi*" PT Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Halim, Abdul. (2004) "*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*", Edisi 2, UPP AMPYKPN Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat. (2004), "*Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*", Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. (2002), "*Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*", ANDI, Yogyakarta
- Rahmadi, Ahmad (2005), "*Analisis Pergeseran Fungsi Lahan Pertanian (Padi) Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1975-2003*", Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rahmadi, Ahmad (2004), "*Analisis Dana Tabungan Dan Kredit Di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Fatwa MUI, Melalui Pendekatan Paired Samples T-Test*", Penelitian Mahasiswa (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Santoso, Singgih. (2001), "*SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*", PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suparmoko, M. Dkk. (2002), "*Ekonomi Pembangunan, Edisi Enam*", BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Suandi hamid, Edy. (2001), *"Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isyu-Isyu Ekonomi Politik Indonesia"*, Ekonesia, Yogyakarta

Sukirno, Sadono. (1985), *"Ekonomi Pembangunan, proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan "* LPFEUI, Jakarta.

Todaro P, Michael. (2000), *"Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh jilid I"*, Erlangga, Jakarta.

———, *Undang-Undang Otonomi Daerah (2004), Nomor 32 dan 33 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Absolu, Yogyakarta.



LAMPIRAN I

**PMA, PMDN, PDRB, PAD. SEBELUM DAN SESUDAH
DIBERLAKUKANYA OTONOMI DAERAH DI PROP. D.I.
YOGYAKARTA**

KET.	THN	PMA US \$	PMDN RUPIAH	PDRB RUPIAH	PAD RUPIAH
Sebelum Otonomi Daerah	1998	140.065.688	Rp 1.299.965.604.260	Rp 4.685.777.000.000	Rp 40.594.308.000
	1999	129.141.658	Rp 1.322.585.842.887	Rp 4.824.445.000.000	Rp 57.877.500.000
	2000	101.061.428	Rp 1.815.182.865.869	Rp 5.017.709.000.000	Rp 84.225.979.000
Sesudah Otonomi Daerah	2001	125.804.700	Rp 1.941.346.291.893	Rp 5.182.544.000.000	Rp 142.284.892.000
	2002	106.478.568	Rp 1.961.732.260.090	Rp 5.395.054.000.000	Rp 169.489.772.000
	2003	140.035.056	Rp 2.405.274.896.484	Rp 5.615.557.000.000	Rp 208.475.720.000

Sumber data: D.I. Yogyakarta Dalam Angka 1998-2003

LAMPIRAN II

Output Bagian Pertama atau Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SBPMA	US \$ 123.422.924.66	3	US \$ 20.121.158.21	US \$ 11.616.956.10
	SDPMA	US \$ 124.106.108.00	3	US \$ 16.842.606.18	US \$ 9.724.083.20
Pair 2	SBPMDN	Rp 1.479.244.771.005.33	3	Rp 291.150.685.186.14	Rp 168.095.926.466.96
	SDPMDN	Rp 2.102.784.482.822.33	3	Rp 262.162.611.164.78	Rp 151.359.654.127.44
Pair 3	SBPDRB	Rp 4.842.643.666.666.67	3	Rp 166.712.647.262.68	Rp 96.251.591.774.42
	SDPDRB	Rp 5.397.718.333.333.33	3	Rp 216.518.794.903.19	Rp 125.007.184.521.97
Pair 4	SBPAD	Rp 60.899.262.333.33	3	Rp 21.972.231.663.22	Rp 12.685.673.865.46
	SDPAD	Rp 173.416.794.666.67	3	Rp 33.269.694.289.24	Rp 19.208.266.953.75

Output Bagian Kedua Atau Paired Samples Correlation

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SBPMA & SDPMA	3	-.633	.564
Pair 2	SBPMDN & SDPMDN	3	1.000	.000
Pair 3	SBPDRB & SDPDRB	3	.996	.053
Pair 4	SBPAD & SDPAD	3	1.000	.011

Output Bagian Ketiga atau Paired samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	SBLMPMA	-683.183.33	33.425.550.77	19.298.250.73	-	82.350.487.86	-.035	2	.975
	STLHPMA				83.716.854.53				
Pair 2	SBLMPMDN	-	28.988.075.55	16.736.273.22	-	-	-37.257	2	.001
	STLHPMDN	623.539.711.817.00	5.85	5.46	695.550.083.496.35	551.529.340.137.65			
Pair 3	SBLMPDRB	-	52.300.370.69	30.195.633.09	-	-	-18.383	2	.003
	STLHPDRB	555.074.666.666.67	0.21	6.71	684.995.989.836.74	425.153.343.496.59			
Pair 4	SBLMPAD	-	11.306.790.58	6.527.978.588.	-	-	-17.236	2	.003
	STLHPAD	112.517.532.333.33	5.35	12	140.605.157.225.27	84.429.907.441.39			